



PEMERINTAH KOTA BLITAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Anjasmoro Nomor 21, Blitar, Kode Pos: 66117, Telp. (0342) 804063

<http://bakesbangpol.blitarkota.go.id>, email: bakesbangpol@blitarkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 700.1.2.9/ 004.1 /410.204.01/2026

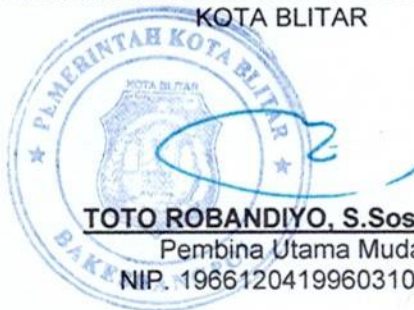
Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si
NIP : 19661204 199603 1 004
Pangkat : Pembina Utama Madya
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kota Blitar

Menerangkan bahwa guna menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700.1.2.9/885/410.050/2025, tanggal 22 September 2025 perihal Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2025, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 telah menyelenggarakan rapat pembahasan pengukuran kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengetahui permasalahan/hambatan dalam mencapai target kinerja, sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan strategi dan pengambilan keputusan untuk menjaga agar target kinerja dapat tercapai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 15 Januari 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BLITAR



TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004



PEMERINTAH KOTA BLITAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Anjasmoro Nomor 21, Blitar, Kode Pos: 66117, Telp. (0342) 804063

<http://bakesbangpol.blitarkota.go.id>, email: bakesbangpol@blitarkota.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026

Pukul : 09. 00 s.d Selesai

Acara : Rapat koordinasi Pengukuran kinerja

Pimpinan Rapat : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

Hadir Dalam Rapat : Karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

Hasil Rapat :

- I. Pengukuran IKU Tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan hasil :
- 1. IKU I : Persentase kejadian SARA tertangani, capaian kinerjanya pada tahun 2025 sebesar 100 % dengan kategori **sangat berhasil**
 - 2. IKU II : persentase konflik sosial tertangani, didapat capaian kinerja utama yang kedua pada tahun 2025 sebesar 100 %, dengan kategori **sangat berhasil**.
 - 3. IKU III : persentase ormas dan orpol yang aktif. pada tahun 2025 sebesar 112,34%, dengan kategori **sangat berhasil**.
 - 4. IKU IV: Nilai SAKIP PD. Pada tahun 2025 mendapatkan nilai 86,66 atau 101,96%, dengan kategori **sangat berhasil**.

II. Pengukuran Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PROGRES/ KEMAJUAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penggunaan e-katalog Versi 6 sudah mulai lancar sehingga mempercepat laporan keuangan karena lebih praktis	Masih perlunya belajar menyesuaikan penggunaan katalog versi 6	Diharapkan semua bisa dan memahami tentang transaksi dan laporan keuangan pada e-katalog

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka Pembentukan paskibraka Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka Duta Pancasila Pelaksanaan tugas purna paskibraka Duta Pancasila Pengangkatan purna paskibraka Duta Pancasila	a. Terbit SK FPK b. Terbit Perwali PPWK c. Terukurnya IHAI	a. SK Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum ada persetujuan dari Walikota b. Perwali Pedoman Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PPWK) belum disetujui oleh Walikota c. Belum adanya pengukuran Indeks Harmoni Indonesia secara mandiri	a. Pengajuan kembali draft SK FPK b. Pengajuan kembali Perwali PPWK c. Mengukur IHAI secara mandiri
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan politik dengan peserta Perempuan dan disabilitas	Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik	Kesetaraan gender dalam politik dengan pemberian pendidikan politik bagi perempuan dan disabilitas

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	a. Kenaikan jumlah Ormas yang mengisi aplikasi e-landa untuk melaporkan keaktifannya b. Sosialisasi SK Tim Terpadu Pengawasan Ormas dengan anggota terdiri dari instansi vertikal (Polres, Kodim, BIN, Kejaksaan, Imigrasi)	Kurangnya kesadaran Ormas melaporkan keberadaanya	a. Sosialisasi aplikasi e-landa b. Sosialisasi Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian sosialisasi dan patrol gabungan dalam pemberantasan miras dan narkoba	Belum mempunyai data tersendiri terkait wilayah yang masuk zona merah (miras dan narkoba)	Membentuk satgas P4GN
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	a. Rakor kewaspadaan dini dan penanganan konflik b. Terlaksananya dialog Forkopimda dengan masyarakat	a. kurangnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berkembang di masyarakat. b. Kurangnya ruang dialog bagi masyarakat yang terdampak konflik	a. peningkatan kewaspadaan dini masyarakat; b. membangun budaya dialog, pluralisme

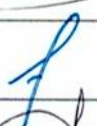
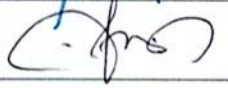
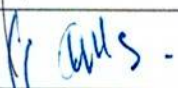
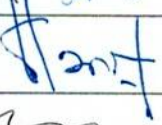
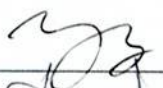
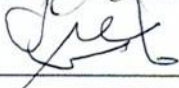
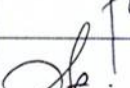
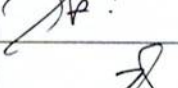
Blitar, 15 Januari 2026
NOTULIS



YUYUN INDAH DWIRAHAYU, S.E., M.M.



DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR
KAMIS, 15 JANUARI 2026

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Putu	fulsun	
2.	Susliantiati	Secretaris	
3.	Pempri Yusranto	Kabid. Wasnas & PK	
4.	Niken Wahurini	Kabid. Poldagri	
5.	RITA TRANA	Kabid. Wasbang	
6.	Harmuji	Kasubag umum	
7.	Yuzen	Perencana	
8.	Mas Santi	PTK	
9.	Agus Arifan	Staf.	
10.	ELLY DIAN P	ARNPARIS	
11.	MUGH. FITROH	Peneliti Teknis Kebijakan	
12.	Eddy Dedi	Analisis kebijakan	
13.	Potri	Analisis kebijakan	
14.	Yohanna Aprilia	Fasilitator Pemerintahan	
15.	INDRA K	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
16.	Mari Agustina	Peneliti Teknis Kebijakan	
17.	Ika Setyawati	Fasilitator Pemerintahan	
18.	Bagus Setiawan	PLO	
19.	Hadri	PTK	
20.	WISNU MUDA P	PTK.	